



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MARDI BIN DARMAWI, NIK 1405042502940001, tempat lahir Segamai Timur, tanggal lahir 25 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: alkinasafan@gmail.com dan nomor telepon: 085210153693**, sebagai **Pemohon I**;

SITI ELISA BINTI BAKAR, NIK 1405075507890007, tempat lahir Pangkalan Tampoi, tanggal lahir 15 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: alkinasafan@gmail.com dan nomor telepon: 085210153693**, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 19 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2023, dengan tata cara agama Islam di RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan wali nikah wali nasab Paman dari Pemohon II yang bernama Sukar mas kawin berupa sebarang cincin emas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Konbum dan Aris;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nazira Marliza binti Mardi, Pangkalan Tampoi, 03 Juli 2024;
7. Bahwa permohonan istbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah dan untuk mengurus akta kelahiran dan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARDI BIN DARMAWI) dan Pemohon II (SITI ELISA BINTI BAKAR) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 11 September 2023, dengan tata cara agama Islam di RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa perubahan, sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan angka 1 tentang wali berubah menjadi wali nikah Pemohon II ketika menikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Abdul Malik, karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, namun untuk menikahkan Pemohon II diwakilkan kepada saudara sepupu Pemohon II bernama Sukar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1405042502940001, tanggal 14 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1405075507890007, tanggal 30 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai a.n. Basri bin Bahrum dan Pemohon II, Nomor 121/AC/2023/PA.Pkc, tanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Para Pemohon, Nomor B.04.05.07/PW.01/XII/2024/066, tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Siti Wama Binti Daman**, tempat lahir Pangkalan Tampoi, tanggal lahir 11 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pangkalan Tampoi. Rt 03. Rw. 01. Desa Pangkalan Tampoi. Kecamatan Kerumutan. Kabupaten Pelalawan. Propinsi Riau, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 September 2023 di RT. 003, RW.

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Abdul Malik, karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, tetapi untuk menikahkan Pemohon II diwakilkan kepada abang sepupu Pemohon II bernama Sukar, dengan mahar berupa sebarang cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Konbum dan Aris;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, paman kandung (saudara ayah) Pemohon II langsung yang melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

2. **Sentosa Halawa bin Paldi Jiluhu Halawa**, tempat lahir Nias, tanggal lahir 17 Agustus 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Genduang, RT. 007, RW. 002, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Abang Angkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 September 2023 di RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Abdul Malik, karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, tetapi untuk menikahkan Pemohon II diwakilkan kepada abang sepupu Pemohon II bernama Sukar, dengan mahar berupa sebarang cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Konbum dan Aris;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, paman kandung (saudara ayah) Pemohon II langsung yang melakukan *ijab qobul* dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Cerai. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon II dengan suami sebelumnya bernama Basri bin Bahrum telah bercerai sah secara hukum dan agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 September 2023 di RT. 003, RW. 001, Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan berwalikan wali nasab yaitu saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Abdul Malik, karena saat itu ayah kandung dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia, tetapi untuk menikahkan Pemohon II diwakilkan kepada saudara sepupu Pemohon II bernama Sukar, yang ijab qobulnya dilakukan secara langsung antara wakil dari wali nikah Pemohon II dan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Konbum dan Aris;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon masing-masing berstatus sebagai jejaka dan janda cerai hidup, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka sahnyanya suatu perkawinan Para Pemohon, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'alah al-Thalibin* dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dalam kitab yang sama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya:

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;"

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (isbat) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Para Pemohon bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MARDI BIN DARMAWI) dengan Pemohon II (SITI ELISA BINTI BAKAR) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023 di Desa Pangkalan Tampoi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc



(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pkc